

STRATEGI PEMERINTAH DESA MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

Ryan Ariansyah¹ Sahadi²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

e-mail: ryanariansyah55@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi minimnya modal usaha yang dimiliki UMKM, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas dan kurangnya penyediaan sarana dari pemerintah Desa. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan conclusion drawing/verification. Berdasarkan hasil penelitian bahwa strategi Pemerintah Desa melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar secara umum kurang optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi dan keterbatasan anggaran. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berwirausaha, kegiatan sosialisasi dan mengajukan permohonan penambahan anggaran.

Kata Kunci : *Strategi, Pemerintah Desa, Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan data/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan melalui pemberdayaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena UMKM merupakan salah satu penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Kehadiran UMKM tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor UMKM dapat melibatkan banyak orang dengan beragam usaha.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di daerah untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM dalam mempertahankan produk yang ada pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam negeri. UMKM yang banyak tumbuh diberbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci

bagi peningkatan ekonomi daerah. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar (*capital intensive*). Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12 menjelaskan bahwa : Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemerintah Desa Karyamukti mendorong untuk terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terdapat 5 UMKM di Desa Karyamukti yaitu :

1. UMKM Pengrajin Piring Lidi
2. UMKM Pengolahan Kerupuk
3. UMKM Pengolahan Batu Bata
4. UMKM Pengolahan Lidi Kelapa
5. UMKM Pengolah Kerepik Pisang

Namun berdasarkan pengamatan awal yang telah dilakukan di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar diketahui bahwa Strategi

Pemberdayaan UMKM di Desa Karyamukti masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Minimnya modal usaha, modal ialah salah satu kasus utama yang kerap dirasakan UMKM. Terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam pengembangan UMKM di Desa Karyamukti. Mayoritas pengusaha menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Kurangnya permodalan UMKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan yang mengandalkan pada modal dari pemilik UMKM yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan

keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3. Kurangnya penyediaan sarana dari pemerintah Desa untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa dari masyarakat

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang penelitian diatas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu Strategi Pemerintah Desa Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar belum berjalan dengan maksimal dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar?.

LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Menurut Mardikanto (2019:168) “Strategi adalah suatu proses sekaligus produk yang penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan”.

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah rencana untuk meningkatkan atau mencapai tujuan yang diinginkan dan mendapatkan hasil yang maksimal

2. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

“Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka” (Suharto, 2005:57).

Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya meningkatkan potensi masyarakat untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

3. Pengertian Strategi Pemberdayaan

Dalam pengertian sehari-hari, srategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat

yang dikehendaki, oleh karena itu, pengertian strategi rancu dengan: metoda, teknik, atau taktik

Dalam hubungan ini, Ismawan (Priyino, 1996) dalam (Mardikanto 2019:170) menetapkan adanya 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari :

- 1) Pengembangan sumber daya manusia
- 2) Pengembangan kelembagaan kelompok
- 3) Pemupukan modal masyarakat (swasta)
- 4) Pengembangan usaha produktif
- 5) Penyediaan informasi tepat-guna

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Karena metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada.

2. Fokus Kajian

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu menurut Ismawan Priyono (Mardikanto, 2019:170) Ada 5 program strategi pemberdayaan yaitu :

1. Pengembangan sumber daya manusia
2. Pengembangan kelembagaa kelompok
3. Pemupukan modal masyarakat (swasta)

4. Pengembangan usaha produktif
 5. Penyediaan informasi tepat guna
3. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah Strategi Pemerintah Desa Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari:
 - a. Kepala Desa Karyamukti (1 orang)
 - b. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM (1 orang)
 - c. Pelaku UMKM (5 orang)
 Data dalam penelitian ini yaitu data Strategi Pemerintah Desa Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.
 4. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data dan *Conclusion Drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut peneliti sajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Strategi Pemerintah Desa Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar:

1. Dimensi Pengembangan Sumberdaya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual masih kurang optimal, seperti pemerintah desa dalam memfasilitasi pelaku usaha dalam bentuk pelatihan masih kurang dilakukan secara optimal mengingat belum adanya pemateri atau narasumber yang berasal dari pihak yang kompeten dan kurang adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kegiatan pelatihan belum mengarah pada aspek teknis sehingga belum mampu meningkatkan aspek intelektual pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selanjutnya pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan sosialisasi pengembangan UMKM pada para pelaku usaha, pemerintah desa kurang memberikan motivasi berupa pemberian informasi dan penjelasan serta petunjuk pada para pelaku usaha sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui dan memahami akan potensi yang dimiliki, pelaku UMKM belum mengetahui peluang-peluang usaha yang dapat dikembangkan.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses merubah sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik untuk mempersiapkan suatu tanggung jawab di masa mendatang dalam mencapai tujuan organisasi.

Sutrisno (2017:61) menyatakan bahwa:

Pengembangan sumber daya manusia adalah proses persiapan individu-individu untuk memikul tanggungjawab yang berbeda atau lebih tinggi didalam organisasi, biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik.

Teori di atas diperkuat Hasibuan (2016:244) yang menyatakan bahwa:

Sumber Daya Manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang. Yang melakukan serta sifatnya dilakukan masih memiliki hubungan yang erat seperti keturunan dan lingkungannya, sedangkan untuk prestasi kerjanya dimotivasi oleh sebuah keinginan dalam memenuhi keinginannya.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian di atas bertolak

belakang dengan teori pendapat ahli bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan proses persiapan individu-individu agar mampu bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan di dalam organisasinya, pengembangan sumber daya manusia berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Namun demikian dari hasil penelitian yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual masih kurang optimal, seperti pemerintah desa dalam memfasilitasi pelaku usaha dalam bentuk pelatihan masih kurang dilakukan secara optimal mengingat belum adanya pemateri atau narasumber yang berasal dari pihak yang kompeten dan kurang adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, kegiatan pelatihan belum mengarah pada aspek teknis sehingga belum mampu meningkatkan aspek intelektual pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sumber daya manusia memiliki arti keahlian terpadu yang berasal dari daya pikir serta daya fisik yang dimiliki oleh setiap orang oleh karena itu agar prestasi kerjanya dapat ditingkatkan perlu dimotivasi, namun demikian dari hasil penelitian pemerintah desa belum optimal dalam melaksanakan sosialisasi pengembangan UMKM pada para pelaku usaha, pemerintah desa kurang memberikan motivasi berupa pemberian informasi dan

penjelasan serta petunjuk pada para pelaku usaha sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui dan memahami akan potensi yang dimiliki, pelaku UMKM belum mengetahui peluang-peluang usaha yang dapat dikembangkan.

Dengan demikian pengembangan sumber daya manusia merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja, demikian juga dengan kompetensi-kompetensi yang dikembangkan melalui pelatihan dan pengembangan, pembelajaran organisasi, manajemen kepemimpinan, dan manajemen pengetahuan untuk kepentingan peningkatan prestasi kerja.

2. Dimensi Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengembangan kelembagaan kelompok bahwa pengembangan kelembagaan kelompok UMKM telah diperkuat oleh pemerintah desa untuk memiliki legalitasnya dari aspek internal kelembagaan kelompoknya, pemerintah desa telah dapat membantu dalam penyusunan keorganisasian kelompok usaha, penguatan kelembagaan kelompok yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan penguatan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa. Pengembangan kelembagaan kelompok juga dapat dilakukan dari aspek eksternal dalam hal ini pemerintah desa telah dapat membantu perijinan melalui dinas terkait seperti menerbitkan surat

keterangan domisili, surat keterangan usaha dari pemerintah desa dan surat pengantar lainnya

Pengembangan kelompok adalah upaya masyarakat dalam kelompok tersebut, bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang sama, dengan melakukan perubahan-perubahan dalam berbagai aspek. Atau melakukan berbagai penyesuaian dengan perkembangan zaman yang terus berkembang.

Syahyuti (2006) menyatakan bahwa: "Pengembangan kelembagaan kelompok adalah upaya memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal maupun kondisi eksternal".

Kemudian menurut Mardikanto (2013:67) bahwa: "Pengembangan kelompok masyarakat atau kelembagaan dalam masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi dan penguatan kegiatan pemberdayaan".

Berdasarkan teori pendapat ahli di atas bahwa pengembangan kelembagaan kelompok merupakan upaya memperkuat kekuasaan masyarakat baik internal maupun eksternal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa pengembangan kelembagaan kelompok UMKM telah diperkuat oleh pemerintah desa untuk memiliki legalitasnya dari aspek internal kelembagaan kelompoknya, pemerintah desa telah dapat membantu dalam penyusunan keorganisasian kelompok usaha, penguatan

kelembagaan kelompok yaitu untuk meningkatkan partisipasi dan penguatan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa. Pengembangan kelembagaan kelompok juga dapat dilakukan dari aspek eksternal dalam hal ini pemerintah desa telah dapat membantu perijinan melalui dinas terkait seperti mennerbitkan surat keterangan domisili, surat keterangan usaha dari pemerintah desa dan surat pengantar lainnya

Dengan demikian pengembangan kelembagaan kelompok akan mengarah pada opsi maju apabila ada kesinambungan yang harmonis antara sistem dan pelaksanaannya. Suasana yang berlangsung pada sistem tersebut tertata dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau membuat inovasi yang koorperatif satu sama lain.

3. Dimensi Pemupukan Modal Masyarakat (Swasta)

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pemupukan modal masyarakat (swasta) bahwa pemerintah desa belum dapat membantu permodalan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) secara memadai, pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya masih mengandalkan modal sendiri ataupun pinjaman pribadi dari pinjaman perbankan. Pemerintah desa memiliki keterbatasan sumber anggaran ataupun alokasi anggaran yang diberikan pada BUMDes masih minim. Selain itu dalam menciptakan pembentukan modal bagi usaha UMKM, pemerintah desa belum optimal dalam mengupayakan kepada Pemerintah

Daerah melalui Dinas terkait agar memfasilitasi para pelaku usaha untuk mendapatkan modal seperti belum adanya pihak-pihak ataupun dinas terkait yang bersedia memberikan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM.

Bagi pelaku usaha UMKM terdapat dua masalah utama yang dihadapi dalam aspek finansial yaitu perputaran modal awal dan akses terhadap modal kerja dan keuangan jangka panjang guna investasi jangka panjang yang berpengaruh pada pertumbuhan output jangka panjang.

Mardikanto (2013 :172) mengemukakan bahwa: Dengan adanya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan serta menciptakan surplus dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal

Berdasarkan pendapat ahli di atas bahwa melalui pemberian bantuan berupa kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan sehingga mampu untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal. Namun demikian dari hasil penelitian pada pemupukan modal masyarakat (swasta) kurang sejalan dengan teori ahli di atas, mengingat pemerintah desa belum dapat membantu permodalan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

secara memadai, pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya masih mengandalkan modal sendiri ataupun pinjaman pribadi dari pinjaman perbankan. Pemerintah desa memiliki keterbatasan sumber anggaran ataupun alokasi anggaran yang diberikan pada BUMDes masih minim. Selain itu dalam menciptakan pembentukan modal bagi usaha UMKM, pemerintah desa belum optimal dalam mengupayakan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait agar memfasilitasi para pelaku usaha untuk mendapatkan modal seperti belum adanya pihak-pihak ataupun dinas terkait yang bersedia memberikan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM.

Dengan demikian pemupukan modal merupakan landasan dalam perubahan struktural yang tumbuh dan berkembang. Modal usaha tersebut adalah untuk mengembangkan usaha yang dijalankan agar tidak terkendala dengan modal yang kecil.

4. Dimensi Pengembangan Usaha Produktif

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi pengembangan usaha produktif bahwa pemerintah desa melalui pembuatan website masih belum optimal, pemerintah desa dalam membantu para pelaku usaha atau kelompok untuk mengembangkan usahanya dengan cara membuat website masih belum dapat terealisasi. Para pelaku usaha UMKM belum ada yang memiliki website sendiri di jaringan internet sehingga sulit

mengetahui informasi kegiatan-kegiatan usaha melalui internet. Dalam mengembangkan kebersamaan dalam usaha ekonomi produktif, pemerintah desa belum dapat memberikan bantuan pada para pelaku usaha atau kelompok, tentang tata cara pengemasan produk agar menjadi nilai jual yang lebih tinggi. Seperti memberikan arahan dan petunjuk pada pelaku usaha terkait produk yang dihasilkan ataupun mengadakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan di balai desa

Pengembangan usaha produktif dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan, demikian dalam pengembangan usaha produktif masyarakat dituntut untuk diperdayakan berdasarkan keterampilan yang dimiliki, mengembangkan usaha masyarakat menjadi lebih produktif, sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa.

Anwas (2013 :184) mengemukakan bahwa: Usaha dapat dikembangkan dengan cara koperasi atau dengan mengembangkan kebersamaan dalam usaha ekonomi produktif. Dengan demikian roda ekonomi dalam masyarakat makin berputar, sehingga mereka termasuk yang miskin akan mendapatkan penghasilan.

Berdasarkan teori ahli di atas bahwa pengembangan usaha yang produktif dapat dilakukan dengan mengembangkan kebersamaan dalam

usaha ekonomi produktif sehingga roda ekonomi dalam masyarakat makin berputar dan mampu meningkatkan penghasilan masyarakat. Namun demikian dari hasil penelitian dalam pengembangan usaha produktif kurang sesuai dengan pendapat ahli di atas. Pengembangan usaha produktif yang dilakukan pemerintah desa melalui pembuatan website masih belum optimal, pemerintah desa dalam membantu para pelaku usaha atau kelompok untuk mengembangkan usahanya dengan cara membuat website masih belum dapat terealisasi. Para pelaku usaha UMKM belum ada yang memiliki website sendiri di jaringan internet sehingga sulit mengetahui informasi kegiatan-kegiatan usaha melalui internet. Dalam mengembangkan kebersamaan dalam usaha ekonomi produktif, pemerintah desa belum dapat memberikan bantuan pada para pelaku usaha atau kelompok, tentang tata cara pengemasan produk agar menjadi nilai jual yang lebih tinggi. Seperti memberikan arahan dan petunjuk pada pelaku usaha terkait produk yang dihasilkan ataupun mengadakan pelatihan-pelatihan yang dilakukan di balai desa

Dengan demikian pengembangan suatu usaha merupakan tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap pengusaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang

semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.

5. Dimensi Penyediaan Informasi Tepat-Guna

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi penyediaan informasi tepat-guna bahwa pemerintah desa belum sesuai dengan pendapat ahli di atas, dalam penyediaan informasi tepat guna pemerintah desa belum dapat membantu penyebarluasan informasi melalui website Pemerintah Desa karena belum tersedianya website pemerintah desa di jaringan internet yang dapat diakses oleh masyarakat luas sehingga informasi terkait dengan kegiatan produksi dan hasil produksi UMKM sulit untuk diketahui oleh masyarakat luas. Dalam menyediakan informasi tepat guna yang lainnya pemerintah desa belum optimal seperti penyediaan informasi terkait pangsa pasar produk-produk UMKM ataupun informasi pasar yang sedang tren di masyarakat. Pemerintah desa jarang memberikan informasi secara rutin pasar-pasar mana yang dianggap potensial bagi produk-produk UMKM.

Teknologi tepat guna dipandang sebagai sebuah strategi untuk mengoptimalkan pendayagunaan semua aspek sumberdaya lokal (alam, manusia, teknologi, sosial) secara berkelanjutan yang mampu memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa. Secara teknis teknologi tepat guna merupakan

jembatan antara teknologi tradisional dan teknologi maju.

Anwas (2013:129) menyatakan bahwa: Penyedia informasi tepat guna artinya informasi inovasi atau teknologi baru yang diujicobakan didasarkan pada kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, menguntungkan, mampu diujicobakan, mudah dipahami, dan yang lebih penting hasilnya dapat dilihat/dinilai.

Berdasarkan pendapat ahli di atas bahwa penyediaan informasi tepat guna dapat berupa informasi inovasi atau teknologi baru. Informasi tersebut dapat diujicobakan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Namun demikian dari hasil penelitian terkait penyediaan informasi tepat guna yang dilaksanakan pemerintah desa belum sesuai dengan pendapat ahli di atas, dalam penyediaan informasi tepat guna pemerintah desa belum dapat membantu penyebarluasan informasi melalui website Pemerintah Desa karena belum tersedianya website pemerintah desa di jaringan internet yang dapat diakses oleh masyarakat luas sehingga informasi terkait dengan kegiatan produksi dan hasil produksi UMKM sulit untuk diketahui oleh masyarakat luas. Dalam menyediakan informasi tepat guna yang lainnya pemerintah desa belum optimal seperti penyediaan informasi terkait pangsa pasar produk-produk UMKM ataupun informasi pasar yang sedang tren di masyarakat. Pemerintah desa jarang memberikan informasi secara rutin

pasar-pasar mana yang dianggap potensial bagi produk-produk UMKM.

Dengan demikian penyediaan informasi tepat guna dapat memanfaatkan media sosial, situs web pemerintah desa dalam proses marketing. Serta penyediaan informasi tepat guna pemerintah desa memanfaatkan media sosial sebagai propoganda marketing untuk mempublikasikan kegiatan produksi dan produk UMKM. Penyediaan informasi tepat guna apabila dimanfaatkan secara optimal diyakini akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan nilai tambah produk, perbaikan mutu dan membantu dalam mewujudkan usaha produktif yang efisien.

Dalam proses pengalihan teknologi tepat guna kerap ditemukan adanya kesenjangan yang cukup besar antara pemberi teknologi dengan masyarakat sebagai penerima teknologi. Mengingat faktor-faktor tersebut dan adanya keterbatasan modal maka dalam proses alih teknologi kepada masyarakat diperlukan bantuan berbagai pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Pemerintah Desa melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Desa melalui

pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar secara umum dilaksanakan masih kurang optimal. Dari 10 indikator yang diteliti terdapat 5 indikator yang telah dilaksanakan dengan optimal seperti indikator membantu dalam pembuatan persyaratan legalitas kelompok usaha, membantu dalam hal perijinan melalui dinas terkait, mengupayakan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait agar memfasilitasi para pelaku usaha untuk mendapatkan modal dan memberikan informasi secara rutin kepada pelaku usaha terkait pangsa pasar produk-produk UMKM. Sedangkan 5 indikator pelaksanaannya masih kurang optimal. Demikian halnya dengan hasil observasi bahwa pelaksanaan strategi Pemerintah Desa melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar kurang dilaksanakan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa indikator yang pelaksanaannya kurang optimal seperti kurang optimal dalam memfasilitasi dalam bentuk pelatihan bagi para pelaku usaha, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pengembangan UMKM, kurang optimal membantu permodalan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kurang optimal dalam membantu para pelaku usaha atau kelompok untuk mengembangkan usahanya dengan cara membuat website, kurang optimal dalam membantu para pelaku usaha

atau kelompok, tentang tata cara pengemasan produk agar menjadi nilai jual yang lebih tinggi dan kurangnya penyebaran informasi melalui website Pemerintah Desa.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi Pemerintah Desa melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar berupa keterbatasan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan petugas pelatihan, kurangnya kesediaan perangkat desa untuk melakukan sosialisasi secara rutin keterbatasan sumber anggaran yang dimiliki pemerintah desa ataupun alokasi anggaran yang diberikan pada BUMDes masih minim, keterbatasan kemampuan dan keterampilan perangkat desa dalam menguasai teknologi informasi, keterbatasan wawasan dan keterampilan perangkat desa dalam hal berwirausaha.

Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan dalam strategi Pemerintah Desa melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan dan keahlian perangkat desa khususnya yang membidangi kesejahteraan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ataupun memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berwirausaha dan untuk fasilitasi petugas selama ini

pemerintah desa mencari narasumber yang memang benar-benar profesional dalam hal berwirasaha misalnya petugas dari dinas-dinas terkait, memberikan arahan dan petunjuk serta bimbingan secara rutin pada perangkat desa agar kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan pemerintah desa, mengajukan permohonan penambahan sumber anggaran pada pemerintah daerah dan menambah alokasi anggaran untuk BUMDes, memberikan kesempatan pada perangkat desa untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kursus terkait teknologi informasi dan memberikan pelatihan bagi perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anwas, O. M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara.

Hasibuan, Malayu S.P 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi. Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.

Mardikanto, Totok. & Soebiato, Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. rev.ed. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung. : Refika Aditama.

Sutrisno, E. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana

Syahyuti. 2006. *Tiga Puluh Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Dokumen

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.